


Ketepatan Sasaran dalam Program Subsidi Pangan: Evaluasi Kualitatif atas Proses Targeting dan Verifikasi Data Rumah Tangga

Essi Laura Amanda^{1*}, Muammar El Zaidan², Agustin Olivia Simamora³, Kevin Daniel Sirait⁴, Saskia Bella⁵, Muhammad Alhasymi Matondang⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara

E-mail: essilauraa@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4285>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 29 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 12 Dec 2025

Kata Kunci:

Ketepatan sasaran,
Subsidi pangan,
Verifikasi data,
Targeting sosial,
Inclusion dan exclusion error

Keywords:

*Targeting accuracy,
Food subsidies, Data verification, Social targeting, Inclusion and exclusion errors*

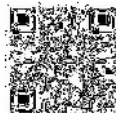
ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menilai akurasi penargetan dalam Program Subsidi Pangan dengan menganalisis proses penentuan dan sistem verifikasi data rumah tangga melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Akurasi penargetan menjadi isu yang krusial karena terdapat tingginya kesalahan inklusi dan eksklusi, di mana rumah tangga yang tidak miskin seringkali mendapatkan bantuan, sementara rumah tangga yang benar-benar miskin justru terlewatkan. Penelitian ini menemukan bahwa masalah utama berasal dari kualitas data sosial yang belum diperbarui, kurangnya kolaborasi antarinstansi, serta kelemahan dalam pengelolaan registri sosial yang tidak fleksibel. Selain itu, metode penargetan seperti proxy means test (PMT) dan penargetan berbasis komunitas juga mengalami masalah teknis dan sosial yang mempengaruhi objektivitas proses verifikasi. Pelaksanaan di lapangan dipengaruhi oleh kebijakan petugas, keterbatasan sumber daya, tekanan dari masyarakat, serta dinamika komunitas yang sering kali menciptakan bias dalam menilai status kemiskinan rumah tangga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbaikan sistem pengumpulan data, penguatan integrasi registri sosial, peningkatan transparansi dalam verifikasi, dan pengembangan kapasitas petugas lapangan merupakan langkah penting untuk mengurangi kesalahan dalam penargetan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan penetapan penerima subsidi pangan dan memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

This study aims to assess targeting accuracy in the Food Subsidy Program by analyzing the household data determination and verification process using a qualitative descriptive approach. Targeting accuracy is a crucial issue due to high levels of inclusion and exclusion errors, where non-poor households often receive assistance, while truly poor households are overlooked. The study found that the main problems stem from the quality of outdated social data, a lack of collaboration between agencies, and weaknesses in the inflexible management of the social registry. Furthermore, targeting methods such as the proxy means test (PMT) and community-based targeting also experience technical and social issues that affect the objectivity of the verification process. Field implementation is influenced by officer policies, limited resources, community pressure, and community dynamics, which often create bias in assessing household poverty status. The study findings suggest that improving data collection systems, strengthening social registry integration, increasing transparency in verification, and developing the capacity of field officers are essential steps to reduce targeting errors. Thus, this study provides comprehensive insight into the factors influencing the accuracy of food subsidy recipient determination and provides a basis for future policy improvements.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Essi Laura Amanda, et al (2025). Ketepatan Sasaran dalam Program Subsidi Pangan: Evaluasi Kualitatif atas Proses Targeting dan Verifikasi Data Rumah Tangga, 4(2) 13048-13053. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4285>

PENDAHULUAN

Ketepatan sasaran dalam program subsidi pangan merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh rumah tangga yang paling membutuhkan. Dalam konteks kebijakan perlindungan sosial modern, efektivitas proses *targeting* banyak dipengaruhi oleh kemampuan program membedakan secara akurat antara rumah tangga miskin dan nonmiskin. Coady, Grosh, dan Hoddinott (2004) menyebut hal ini sebagai *targeting efficiency*, yang tercermin dari minimnya *inclusion error* maupun *exclusion error* dalam proses penetapan penerima manfaat. Selain itu, peningkatan akurasi data rumah tangga sangat bergantung pada tata kelola data (*data governance*) yang baik. Laporan Bank Dunia (2016) menekankan pentingnya *dynamic social registry*, yaitu sistem data sosial yang diperbarui secara berkala dan terintegrasi lintas sektor untuk mengurangi ketidaktepatan akibat data usang atau verifikasi yang lemah. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam program subsidi pangan yang bergantung pada ketepatan informasi demografis dan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga.

Pada level implementasi, kualitas ketepatan sasaran juga dipengaruhi oleh aktor birokrasi di lapangan. Meskipun merupakan teori klasik, konsep *street-level bureaucracy* dari Lipsky tetap relevan karena banyak penelitian modern menunjukkan bahwa keputusan petugas lapangan, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial lokal berperan besar dalam keberhasilan proses verifikasi. Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga dipengaruhi interaksi sosial dan praktik birokrasi sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengevaluasi ketepatan sasaran program subsidi pangan dengan menyoroti proses *targeting* dan verifikasi data rumah tangga melalui pendekatan kualitatif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kendala struktural, administratif, dan sosial yang mempengaruhi akurasi penetapan penerima manfaat.

Dalam literatur kebijakan sosial, ketepatan sasaran sering dikaitkan dengan efektivitas program dalam menciptakan nilai kesejahteraan (*welfare gain*). Menurut Barr (2020), intervensi publik seperti subsidi pangan hanya dapat mencapai tujuan redistributifnya ketika alokasi manfaat tepat pada kelompok yang mengalami defisit konsumsi. Ketika *inclusion error* terlalu besar, beban fiskal meningkat tanpa efek signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Sebaliknya, *exclusion error* menyebabkan kegagalan perlindungan sosial karena kelompok miskin justru tidak menerima bantuan. Dengan demikian, kajian teoretis mengenai ketepatan sasaran menekankan bahwa efisiensi fiskal dan keadilan sosial merupakan dua tujuan yang harus dicapai secara simultan.

Selain itu, perdebatan akademik mengenai metode *targeting* menunjukkan bahwa pemilihan instrumen menentukan ketepatan program. Misalnya, *proxy means test (PMT)* dianggap lebih obyektif dalam menilai kondisi rumah tangga, namun sejumlah studi menunjukkan bahwa pendekatan ini rentan terhadap bias lokal, kesalahan pengukuran, dan data yang tidak diperbarui (Kidd & Athias, 2020). Di sisi lain, *community-based targeting* dapat meningkatkan legitimasi sosial, tetapi juga rawan intervensi elite lokal dan praktik *patronage* (Alatas et al., 2012). Dengan demikian, setiap pendekatan membawa tantangan tersendiri yang memengaruhi kualitas verifikasi dan akurasi penerima manfaat. Penting pula untuk meninjau hubungan antara tata kelola data dan kinerja program bantuan sosial. Janssen dan Van der Voort (2020) menegaskan bahwa integrasi data sosial antarinstansi merupakan kunci untuk mencegah duplikasi penerima, meningkatkan proses verifikasi, dan memperkuat akurasi penargetan. Namun, implementasi integrasi data sering terhambat oleh kapasitas teknologi pemerintah daerah, fragmentasi kelembagaan, serta ketidakselarasan regulasi. Kondisi ini sejalan dengan berbagai temuan yang menunjukkan bahwa ketidakteraturan pembaruan data rumah tangga menjadi penyebab utama ketidaktepatan sasaran, terutama pada program berbasis kuota seperti subsidi pangan.

Dari perspektif kelembagaan, implementasi kebijakan seringkali dipengaruhi oleh perilaku aparatur pelaksana. Maynard-Moody dan Musheno (2015) menjelaskan bahwa petugas lapangan tidak hanya mengikuti prosedur administratif, tetapi juga menggunakan *discretion* berdasarkan persepsi moral, tekanan masyarakat, dan keterbatasan operasional. Dalam konteks subsidi pangan, birokrat pada level ini berperan menentukan validitas data, kelayakan rumah tangga, serta akses informasi penerima manfaat. Oleh karena itu, kualitas interaksi antara birokrat dan masyarakat menjadi variabel kunci dalam memastikan verifikasi berjalan sesuai standar.

Literatur lain menyoroti aspek sosial yang turut memengaruhi proses *targeting*. Studi Pasadilla dan Reyes (2019) menunjukkan bahwa dinamika komunitas, kedekatan sosial, dan norma lokal dapat memengaruhi akurasi identifikasi kelompok miskin. Pada beberapa kasus, tekanan sosial membuat

rumah tangga nonmiskin ikut mengklaim bantuan, sedangkan rumah tangga miskin enggan mengakui kondisi mereka karena stigma. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya merupakan persoalan data teknis, tetapi juga persoalan sosiologis yang kompleks.

Melihat beragam pendekatan teoretis tersebut, kajian pustaka ini memperlihatkan bahwa ketepatan sasaran dalam program subsidi pangan dipengaruhi oleh tiga dimensi utama: kualitas data dan sistem registrasi sosial, metode penargetan yang digunakan, serta praktik implementasi di tingkat birokrasi dan komunitas. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi ini, penelitian kualitatif mengenai proses targeting dan verifikasi data rumah tangga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran, sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan kebijakan ke depan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam terkait ketepatan penetapan sasaran dalam Program Subsidi Pangan dengan menganalisis proses penargetan serta mekanisme verifikasi data rumah tangga secara menyeluruh. Pendekatan deskriptif kualitatif sering digunakan dalam penelitian kebijakan sosial dan bantuan pangan karena mampu memberikan gambaran empiris yang faktual dan kontekstual mengenai pelaksanaan program di tingkat lokal. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkapkan fenomena dengan cara apa adanya berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan, tanpa melakukan perubahan pada variabel yang diteliti.

Melalui metode ini, peneliti berusaha untuk meneliti cara pelaksanaan pendataan penerima subsidi pangan, prosedur dalam verifikasi dan validasi data, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi dalam penetapan sasaran. Pendekatan kualitatif terbukti efektif untuk menelaah kendala verifikasi data, mekanisme distribusi bantuan, dan dinamika aktor pelaksana di lapangan (Azarine & Suharto, 2022). Selain itu, pendekatan ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan perspektif narasumber, baik dari pelaksana program maupun masyarakat yang berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses distribusi subsidi pangan, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian mengenai praktik bantuan sosial di beberapa daerah lain (Nunung dkk., 2021).

Dengan cara ini, penerapan metode deskriptif kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penjabaran yang terstruktur, mendalam, dan kontekstual tentang pelaksanaan kebijakan subsidi pangan di area yang diteliti. Pendekatan ini juga terbukti mampu mengungkap isu ketidaktepatan sasaran, baik *inclusion error* maupun *exclusion error*, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi evaluatif mengenai kebijakan bantuan sosial di Indonesia (Purbaningrum & Adinugraha, 2020). Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ketidaktepatan sasaran dan menjadi landasan untuk menyusun rekomendasi peningkatan pada tahap pendataan dan verifikasi program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan analisis kualitatif terhadap implementasi program subsidi pangan, ditemukan bahwa tingkat ketepatan sasaran masih menghadapi beberapa kendala struktural, administratif, dan sosial yang berpengaruh terhadap akurasi penetapan penerima manfaat. Ketidaktepatan ini terutama dipengaruhi oleh kualitas data sosial yang belum mutakhir, kurangnya integrasi sistem informasi antarinstansi, serta proses verifikasi di lapangan yang dipengaruhi oleh praktik discretion petugas dan dinamika sosial lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program subsidi pangan masih menghadapi permasalahan serius, terutama terkait tingginya *inclusion error* dan *exclusion error*, yaitu kondisi ketika rumah tangga yang tidak miskin justru menerima bantuan, sementara rumah tangga miskin yang seharusnya berhak tidak mendapatkan akses. Ketidaktepatan ini terutama dipengaruhi oleh kelemahan dalam sistem pendataan rumah tangga yang belum mutakhir serta belum terintegrasi secara nasional, sehingga verifikasi kelayakan penerima manfaat menjadi tidak akurat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Kusumawati (2019) yang menunjukkan bahwa efektivitas targeting bantuan sosial di Indonesia masih rendah karena basis data kesejahteraan sering tidak sesuai dengan kondisi aktual masyarakat, sehingga memunculkan masalah distribusi yang tidak adil. Secara umum, efektivitas penargetan bantuan

sosial di Indonesia menunjukkan hasil campuran (mixed). Bantuan sosial tetap relevan dan memiliki potensi signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan melindungi kelompok rentan terutama di daerah pedesaan, saat krisis ekonomi, atau bagi rumah tangga miskin paling rentan. Namun, keberhasilan tersebut sangat tergantung pada ketepatan sasaran, kualitas data, dan pelaksanaan yang baik. Kelemahan dalam targeting terutama exclusion/inclusion error, data usang, koordinasi program yang fragmented, dan kurangnya transparansi mengurangi dampak jangka panjang terhadap kemiskinan dan rentabilitas anggaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas, perlu perbaikan sistem registri sosial, integrasi data lintas program, metode targeting hybrid, serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat. Dimana hal tersebut sejalan dengan Laporan Bank Dunia (2016) menekankan pentingnya dynamic social registry, yaitu sistem data sosial yang diperbarui secara berkala dan terintegrasi lintas sektor untuk mengurangi ketidaktepatan akibat data usang atau verifikasi yang lemah. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam program subsidi pangan yang bergantung pada ketepatan informasi demografis dan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga. Selain itu, implementasi di lapangan juga dipengaruhi keterbatasan kapasitas petugas program, kurangnya transparansi, serta pengaruh sosial lokal yang memengaruhi penilaian mereka terhadap status kemiskinan rumah tangga. Berdasarkan temuan Azarine & Suharto (2022) pendekatan kualitatif terbukti efektif untuk menelaah kendala verifikasi data, mekanisme distribusi bantuan, dan dinamika aktor pelaksana di lapangan. Selain itu, pendekatan ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan perspektif narasumber, baik dari pelaksana program maupun masyarakat yang berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses distribusi subsidi pangan, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian mengenai praktik bantuan sosial di beberapa daerah lain (Nunung dkk., 2021).

Pembahasan

Permasalahan ketepatan sasaran dalam subsidi pangan menunjukkan bahwa akar persoalan tidak hanya terletak pada instrumen penentuan penerima manfaat, tetapi juga pada kelemahan tata kelola data dan mekanisme implementasi kebijakan di lapangan. Ketiadaan dynamic social registry, sebagaimana direkomendasikan Bank Dunia (2016), mengakibatkan basis data yang digunakan pemerintah bersifat statis dan tidak responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi rumah tangga, terutama situasi krisis, PHK, migrasi, dan fluktuasi pendapatan. Kondisi ini menyebabkan proses targeting tidak mampu membedakan dengan tepat antara rumah tangga miskin dan nonmiskin, padahal akurasi data merupakan syarat utama tercapainya efisiensi fiskal dan keadilan sosial. Sebagaimana ditegaskan Barr (2020), strategi redistribusi negara hanya akan berhasil jika manfaat dialokasikan secara tepat kepada kelompok yang mengalami defisit konsumsi; jika tidak, program justru memboroskan anggaran dan gagal menjalankan fungsi proteksi bagi kelompok rentan.

Di sisi lain, metode penargetan seperti proxy means test (PMT) yang dianggap objektif juga memiliki kelemahan signifikan. Metode ini menghitung skor miskin berdasarkan variabel-variabel yang dianggap merepresentasikan kemampuan ekonomi rumah tangga. PMT tidak selalu mampu menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga secara akurat karena indikator kesejahteraan yang digunakan sering tidak mencerminkan pola pendapatan informal dan kerentanan yang bersifat dinamis. Kidd dan Athias (2020) menunjukkan bahwa pendekatan PMT rentan terhadap kesalahan pengukuran, bias lokal, dan data usang sehingga dapat meningkatkan risiko exclusion error. Sementara itu, metode community-based targeting memang meningkatkan legitimasi sosial karena melibatkan partisipasi masyarakat, namun juga berisiko menimbulkan konflik kepentingan, patronase, dan tekanan sosial terhadap petugas lapangan (Abay dkk., 2024; Alatas dkk., 2012). Hal ini membuktikan bahwa ketepatan sasaran bukan sekadar persoalan teknis, melainkan merupakan persoalan sosial dan politis dalam konteks relasi kekuasaan lokal.

Selain instrumen dan data, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh teori street-level bureaucracy yang dikemukakan Lipsky (2010), yang menjelaskan bahwa petugas lapangan memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan melalui diskresi dalam pengambilan keputusan. Maynard-Moody dan Musheno (2015) menambahkan bahwa petugas tidak hanya menjalankan prosedur, tetapi juga menginterpretasikan aturan berdasarkan nilai moral, tekanan masyarakat, serta keterbatasan operasional. Dalam konteks subsidi pangan, interaksi antara birokrat dan masyarakat sangat menentukan apakah proses verifikasi berjalan objektif atau justru bias. Selain itu, seperti dicatat Pasadilla dan Reyes (2019), norma sosial dan stigma kemiskinan seringkali mempengaruhi keberanian masyarakat miskin untuk mendaftarkan diri, sehingga exclusion error menjadi semakin sulit diatasi.

Ketepatan Sasaran dalam Program Subsidi Pangan: Evaluasi Kualitatif atas Proses Targeting dan Verifikasi Data Rumah Tangga, Essi Laura Amanda, Muammar El Zaidan, Agustin Olivia Simamora, Kevin Daniel Sirait, Saskia Bella, Muhammad Alhasymi Matondang 13052

Dengan melihat permasalahan yang kompleks ini, dapat disimpulkan bahwa penyempurnaan ketepatan sasaran subsidi pangan harus dilakukan melalui pendekatan holistik. Pemerintah perlu memperkuat integrasi dan pembaruan data sosial antarinstansi, meningkatkan transparansi mekanisme penentuan penerima, mengembangkan kombinasi instrumen targeting berbasis data dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kapasitas petugas lapangan untuk mencegah penyalahgunaan diskresi. Tanpa langkah strategis tersebut, subsidi pangan berisiko terus mengalami kegagalan fungsi dalam menciptakan kesejahteraan dan memperkecil kesenjangan sosial.

SIMPULAN

Penelitian ini menyatakan bahwa akurasi dalam Program Subsidi Pangan masih terhambat oleh berbagai masalah mendasar yang berasal dari aspek teknis, administratif, dan sosial. Tingginya angka kesalahan inklusi dan eksklusi menunjukkan bahwa sistem penargetan belum berhasil mengenali rumah tangga miskin dengan tepat. Masalah ini terutama disebabkan oleh basis data sosial yang tidak diperbaharui secara teratur, lemahnya integrasi registri sosial antar lembaga, dan mekanisme verifikasi yang belum sepenuhnya berbasis objektivitas. Selain itu, alat penargetan seperti uji means proxy (PMT) dan penargetan berbasis komunitas juga belum mampu mengatasi bias lokal serta dinamika sosial yang mempengaruhi proses identifikasi penerima manfaat. Peran petugas lapangan sebagai birokrat tingkat akar juga berdampak pada keakuratan penetapan sasaran melalui praktik diskresi yang dipengaruhi oleh tekanan sosial, pandangan moral, dan keterbatasan dalam operasional. Oleh sebab itu, peningkatan akurasi penargetan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembaruan registri sosial yang dinamis, integrasi data antar sektor, transparansi dalam mekanisme verifikasi, penerapan metode penargetan hibrida, serta penguatan kapasitas petugas lapangan. Tanpa adanya perbaikan yang menyeluruh, subsidi pangan memiliki risiko untuk terus menjadi tidak efektif dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial dan mencapai tujuan redistributifnya. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi struktural dalam penentuan penerima manfaat agar program bisa memberikan dampak kesejahteraan yang lebih baik bagi rumah tangga miskin dan rentan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terimakasih ditujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, saran, dan bimbingan sepanjang proses penelitian. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada informan, aparat desa, dan masyarakat yang telah meluangkan waktu serta memberikan data dan informasi yang sangat penting bagi penelitian ini. Selain itu, penghargaan juga ditujukan kepada teman-teman mahasiswa yang membantu dalam kegiatan pengumpulan data dan diskusi selama penulisan penelitian.

REFERENSI

- Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., Purnamasari, R., & Wai-Poi, M. (2012). Targeting the poor: Evidence from a field experiment in Indonesia. *American Economic Review*, 102(4), 1206–1240.
- Abay, A.K, dkk. (2024). Targeting Social Assistance in Fragile Settings An Experiment on Community-Based Targeting. *International Food Policy Research Institute*, 1 – 44.
- Barr, N. (2020). *The economics of the welfare state* (6th ed.). Oxford University Press.
- Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons and experience. *World Bank*.
- Janssen, M., & Van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101–107.
- Kidd, S., & Athias, D. (2020). Hit and miss: An assessment of targeting effectiveness in social protection. *Development Pathways*.
- Kusumawati, A. (2019). The Effectiveness of Targeting Social Transfer Programs in Indonesia. *Ministry of National Development Planning*, 3(3), 282 – 297.
- Maynard-Moody, S., & Musheno, M. (2015). States of compliance: Street-level workers as regulators. *Policy Studies Journal*, 43(2), 296–318.
- Nunung, A., Latifah, L., Fatmawati, F., & Sulastri, L. (2025). Implementasi kebijakan bantuan sosial

- untuk menginvestigasi ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Desa Rancaekek Kulon Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 62–82. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.62-82.2025>
- Pasadilla, G., & Reyes, C. (2019). Community dynamics and social protection targeting. *Journal of Asian Public Policy*, 12(3), 354–371.
- Purbaningrum, D., & Adinugraha, H. H. (2024). Transformasi kebijakan publik: Menyiasati ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Desa Pringsurat untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(2), 31–44.
- World Bank. (2018). The state of social safety nets 2018. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1254-5>